

CEPF Final Project Completion Report

Organization Legal Name:	Yayasan Kehutanan Masyarakat Indonesia
Project Title:	Revision of Conservation Law and Regulations in Indonesia
Grant Number:	66381
CEPF Region:	Wallacea
Strategic Direction:	6 Enhance civil society capacity for effective conservation action in Wallacea
Grant Amount:	\$159,034.00
Project Dates:	December 01, 2016 - September 30, 2018
Date of Report:	November 29, 2018

Implementation Partners

List each partner and explain how they were involved in the project

1. **Kelompok Kerja Kebijakan Konservasi (POKJA KONSERVASI);** Kelompok kerja yang peduli pada persoalan konservasi dan kebijakannya. Anggota POKJA KONSERVASI terdiri dari individu-individu yang didukung oleh lembaga-lembaganya antara lain FKKM, WCS, ICEL, WWF, PILI, dan KEHATI. FKKM bersama POKJA KONSERVASI secara aktif berperan dalam proses mendorong perubahan kebijakan konservasi keragaman hayati, melalui audiensi dengan policy maker, kampanye dan merilis paper-paper tentang pentingnya perubahan kebijakan tersebut
2. **Forum Pimpinan Lembaga Pendidikan Tinggi Kehutanan Indonesia (FOReTIKA);** Akademisi. Mitra FKKM dalam memberikan input terhadap perubahan kebijakan Konservasi, yang merupakan perwakilan dari akademisi kehutanan Indonesia. FOReTIKA bersama FKKM aktif mengadakan diskusi membahas kebijakan konservasi. Input tersebut juga telah disampaikan ke DPR melalui forum audiensi bersama Komisi IV DPR RI
3. **Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK);** Instansi Pemerintah; Mitra FKKM dalam mendorong perubahan kebijakan konservasi keragaman hayati dan perhutanan sosial
4. **Sekretariat Komisi IV DPR RI; Lembaga Negara; Mitra FKKM bersama POKJA KONSERVASI** dalam mendorong perubahan kebijakan konservasi keragaman hayati khususnya Revisi UU No. 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya
5. **Mitra-mitra CEPF.** mitra FKKM dalam mendorong pelaksanaan kebijakan PS dan Konservasi kehati

Conservation Impacts

Summarize the overall impact of your project, describing how your project has contributed to the implementation of the CEPF ecosystem profile

Revisi Undang-Undang No. 5/1990 (RUU 5/90) telah menjadi Hak Inisiatif DPR, dimana Badan Legislatif DPR telah membuat Draf RUU Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistem. Selama proses penyusunan Draf RUU tersebut FKKM beserta mitra dengan dukungan CEPF turut aktif melakukan dialog dalam rangka mengumpulkan materi untuk memberikan input terhadap DPR melalui dialog baik dalam skala kecil maupun besar. FKKM juga telah melakukan audiensi dengan Komisi IV DPR RI dalam rangka menyampaikan input tersebut.

Update kondisi draf RUU DPR per tanggal 5 Desember 2017 telah dikomunikasikan dan dibahas oleh YKMI/FKKM dengan kelompok masyarakat sipil [WALHI, ICEL, WCS, FWI, PILI, Greenpeace, CI, BOS, Kehati, TFCA, Partnership, BRWA, and Burung Indonesia]. FKKM juga telah mengkomunikasikan draf tersebut dengan expert dari akademisi di beberapa universitas. Akan tetapi dalam Rapat Kabinet Terbatas tanggal 4 April 2018, pemerintah menganggap Revisi UU 5/90 saat ini belum diperlukan. Hal ini terkonfirmasi oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan dalam acara Lokakarya Konservasi Keanekaragaman Hayati Laut di Luwuk 2-3 Mei 2018 yang diselenggarakan oleh FKKM atas dukungan CEPF. Konfirmasi langsung juga disampaikan Dirjen KSDAE-KLHK pada acara Diskusi Mendorong UU No 5 / 1990 tentang KSDAE di UI tanggal 24 Mei 2018. Walau demikian dalam audiensi/komunikasi FKKM dan Pokja Konservasi dengan DPR tanggal 10 April 2018 didapatkan informasi bahwa DPR tetap berniat melanjutkan Revisi UU 5/90. FKKM juga telah merilis Position Paper tentang Revisi UU 5/90 untuk disampaikan kepada para pihak, dengan tema “Peluang Pengelolaan Kawasan Konservasi oleh Masyarakat dan Perlindungan Jenis Hidupan Liar di tengah Dinamika Perubahan Regulasi”.

Melelui project ini, FKKM juga mendorong kebijakan pemberdayaan masyarakat di Kawasan hutan negara. FKKM bersama para pihak mengawal terbentuknya Perdirjen KSDAE tentang Kemitraan Konservasi yang membuka ruang masyarakat terlibat dalam pengelolaan di Kawasan Konservasi. Draf Perdirjen KSDAE ini dikomunikasikan dengan mitra CEPF dan UPT KSDAE pada Rapat Koordinasi Kemitraan Konservasi di Labuan Bajo 10-11 Januari 2018. Draf ini kemudian resmi ditandatangani oleh Dirjen KSDAE pada tanggal 6 Juni 2018 dan menjadi Perdirjen KSDAE No. P.6/KSDAE/SET/Kum.1/6/2018.

FKKM bersama Direktorat Penyiapan Kawasan Perhutanan Sosial [PKPS] membuat Draf Pedoman Evaluasi Perhutanan Sosial. Dokumen ini untuk mengevaluasi Perhutanan Sosial yang telah mendapatkan ijin lebih dari 5 tahun dan telah diujicobakan di 5 propinsi [NTB, Bali, DI Yogyakarta, Sulawesi Tenggara, dan Bengkulu] pada November – Desember 2017. Dengan dukungan CEPF, FKKM juga telah mengadakan diskusi dengan para pihak untuk melihat Pedoman, Pelaksanaan, dan Hasil Ujicoba Evaluasi Perhutanan Sosial tersebut pada Mei dan Juni 2018 di Jakarta.

Dalam rangka mendorong implementasi Perhutanan Sosial di wilayah kerja mitra CEPF, FKKM / YKMI bekerja sama dengan BPSKL dan Dinas Kehutanan setempat telah mengadakan 2 kali pertemuan untuk mendorong Percepatan Perhutanan Sosial (PS) ini. Pertemuan pertama diadakan pada 28 Agustus di Ternate, Maluku Utara. Pertemuan berikutnya diadakan di Kupang, NTT pada 14-15 November. Pertemuan tersebut juga merumuskan rencana kerja PS di setiap wilayah dan menghasilkan road map untuk percepatan Perhutanan Sosial. Tindak lanjut dari pertemuan tersebut, dimonitor dan di asistensi oleh Koordinator Proyek yang juga menjadi Tim Penggerak Percepatan Perhutanan Sosial yang dibentuk KLHK.

Pada tingkat lapangan, FKKM melakukan asistensi kepada mitra CEPF, khususnya kebijakan Konservasi Keragaman Hayati dan Perhutanan Sosial. Pada 29-30 Agustus 2017, asistensi

dilakukan kepada AMAN Maluku Utara. Asistensi kebijakan Perhutanan Sosial khususnya Hutan Adat dan Kemitraan Konservasi menjadi topik di Maluku Utara ini. Pada 16-18 November 2017 dilakukan asistensi dengan topik HKM ke Kabupaten Sikka-NTT kepada Ayu Tani dan Wahana Tani Mandiri. Pada 6-8 September 2017, FKMM mengundang AMAN Maluku Utara dan Balang Institute menghadiri event Festival Perhutanan Sosial Nusantara di Jakarta. Pada kesempatan ini, AMAN Maluku Utara menyerahkan dokumen usulan Hutan Adat di wilayah dampingannya kepada Sekretaris Dirjen PSKL. Pada 12-14 Januari 2018 dilakukan asistensi ke Yayasan Tananua Flores dengan topik kebijakan Kemitraan Konservasi di Taman Nasional Kelimutu. Pada 15-20 April 2018 dilakukan asistensi ke Perkumpulan Payo Payo dan Balang Institut tentang kebijakan Kemitraan Konservasi, Pengembangan Ekonomi Perhutanan Sosial, dan Konservasi di Hutan Desa. Pada 28-30 April 2018 dilakukan asistensi ke Perkumpulan Wallacea tentang kebijakan Perhutanan Sosial dan upaya Perlindungan Kompleks Danau Malili secara multipihak. Di kesempatan ini, FKMM juga memberikan asistensi tentang pemanfaatan dan potensi usaha HHBK kepada kelompok tani binaan Perkumpulan Wallacea.

Planned Long-term Impacts - 3+ years (as stated in the approved proposal)

Impact Description	Impact Summary
The Conservation of Natural Resources and Ecosystems Law (UU 5/1990) and relevant ministerial regulations guarantee protection of natural ecosystems and the sustainable use by communities.	Upaya para pihak yang concern dengan konservasi dalam mendorong adanya revisi UU 5/1990 tetap terus dilakukan, antara lain melalui forum dialog dan kampanye. Hingga saat ini, proses masih berada di DPR. Peraturan menteri dan peraturan Dirjen yang terkait dengan pemberdayaan masyarakat dan perlindungan sumberdaya alam juga telah dirilis oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Dengan proses aktivitas yang telah dilakukan FKMM bersama para pihak selama pelaksanaan proyek yang didukung CEPF, peraturan tersebut terus dimonitor dan dievaluasi oleh FKMM dan mitra di tingkat tapak. Sehingga gap antara kebijakan dan kondisi lapangan yang sering menjadi hambatan implementasi kebijakan dapat diminimalisir. Dengan begitu, kondisi Sumber Daya Alam terjaga dan Masyarakat Sejahtera, secara bertahap akan dapat diwujudkan.

Planned Short-term Impacts - 1 to 3 years (as stated in the approved proposal)

Impact Description	Impact Summary
1. Revised Conservation of Natural Resources and Ecosystems Law (UU5/1990) under consideration by Parliament by 2018.	Setelah rapat Paripurna DPR pada 5 Desember 2017. Revisi UU No 5/1990 telah menjadi Agenda Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas di tahun 2018, dan menurut situs resmi DPR, Revisi UU No 5/1990 termasuk dalam nomor urut 13 dalam daftar prioritas Prolegnas. Namun kondisinya, draft saat ini masih dirasa 'belum cukup baik', sehingga FKMM dengan kelompok masyarakat sipil lainnya terus memantau proses dan substansinya melalui kampanye dan

	<p>pertemuan audiensi ke berbagai fraksi / partai di DPR, termasuk menyerahkan kertas posisi untuk kembali memberikan masukan dari CSO.</p>
<p>2. DirGen DKSDAE and PSKL regulations, facilitating greater community empowerment, accepted and in use by Ministry of Environment and Forestry</p>	<p>Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, melalui Dirjen KSDAE telah mengeluarkan kebijakan untuk memfasilitasi pemberdayaan masyarakat di kawasan konservasi. Peraturan tersebut adalah Petunjuk Teknis tentang Kemitraan Konservasi di Kawasan Konservasi. FKKM dengan dukungan CEPF juga telah berkontribusi untuk mengawal proses pembentukan peraturan tersebut. Salah satunya adalah memfasilitasi mitra CEPF untuk mendapatkan penjelasan tentang substansi regulasi dan memberikan masukan langsung kepada pembuat kebijakan (KSDAE-KLHK). Segera setelah peraturan tersebut dirilis, FKKM melakukan asistensi dan mendorong mitra CEPF untuk segera menerapkannya di daerah masing-masing, dan memfasilitasi mereka untuk melakukan audiensi langsung dengan Direktur Jenderal KSDAE. FKKM telah melakukan serangkaian pertemuan dengan PSKL-KLHK dan pemangku kepentingan lainnya untuk membahas penyusunan Panduan Monitoring & Evaluasi Perhutanan Sosial, dimana panduan tersebut telah digunakan untuk melakukan uji coba di 5 provinsi. FKKM juga telah mengeluarkan Kertas Posisi yang fokus untuk memberikan masukan kepada PSKL-KLHK tentang Monitoring & Evaluasi pada Perhutanan Sosial.</p>
<p>3. Civil society organizations in Wallacea are taking positive advantage of revised law and regulations to better implement their work.</p>	<p>Proses revisi UU (UU) No. 5/1990 masih terus berlangsung. Namun, Perdirjen KSDAE terkait kemitraan konservasi telah dikeluarkan, ini akan membawa dampak positif bagi CSO yang bekerja di kawasan konservasi. Serangkaian asistensi juga telah dilakukan kepada mitra CEPF di Wallacea. Diskusi mendalam dan rekomendasi tentang isu-isu di lapangan juga disampaikan oleh tim asistensi (expert Perhutanan Sosial, Keanekaragaman Hayati, dan Pengembangan Ekonomi).</p>

Describe the success or challenges of the project toward achieving its short-term and long-term impact objectives

Sukses:

- **Perdirjen KSDAE No. 6 Tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis Kemitraan Konservasi Pada Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam terbit atas dorongan para pihak, salah satunya FKKM dengan dukungan CEPF. Peraturan ini dapat memberikan kepastian hukum kepada masyarakat dalam melakukan pengelolaan di kawasan konservasi.**

- Salah satu lokasi dampingan Yayasan Tananua Flores yaitu Desa Niowula berhasil membuat Nota Kesepahaman dan Perjanjian Kerjasama Kemitraan Konservasi dengan Taman Nasional Kelimutu sebagai hasil asistensi FKKM dengan dukungan CEPF.
- FKKM berhasil membuat Pedoman Evaluasi Perhutanan Sosial yang diujicoba oleh Direktorat Penyiapan Kawasan Perhutanan Sosial Ditjen PSKL KLHK di 5 propinsi.

Challenges:

Proses pembuatan undang-undang tidak bisa dipungkiri terkait dengan kepentingan politis, begitu pula dengan rencana Revisi UU 5/1990. Draf RUU Revisi UU 5/90 yang dibuat oleh KLHK dengan melibatkan LSM cukup jauh berbeda dengan Draf RUU yang disusun DPR. Walau sudah dilakukan Rapat Dengar Pendapat Umum dan audiensi akan tetapi ketika kemudian Pemerintah memutuskan bahwa Revisi UU 5/90 belum saatnya dilakukan maka prosesnya tidak mulus untuk dilanjutkan. Tantangannya kemudian adalah bagaimana merespon situasi di lapangan dengan kebijakan yang lebih progresif sehingga konservasi keragaman hayati tetap dapat dilakukan dengan baik.

Were there any unexpected impacts (positive or negative)?

- Revisi UU 5/90 yang diperkirakan bisa diselesaikan tahun 2017 atau 2018 ternyata tidak bisa diselesaikan karena Pemerintah menganggap belum menjadi prioritas (-)
- Kemitraan Konservasi direncanakan sebagai bentuk kebijakan yang didorong tercapai dengan terbitnya Perdirjen KSDAE No. P.6/2018, bahkan kemudian berhasil diimplementasikan di salah satu dampingan mitra CEPF: Desa Niowula yang berada di Taman Nasional Kelimutu (+)

Project Components and Products/Deliverables

Describe the results from each product/deliverable:

Component		Deliverable		
#	Description	#	Description	Results for Deliverable
1	Consolidate stakeholder input for revision of Conservation of Natural Resources and Ecosystems Law (UU No 5 / 1990)	1.1	Meeting agendas; participant lists by name, organizational affiliation, and gender; and summary notes from audience meeting with DPR (1 meeting)	<p>FKKM / YKMI bekerja sama dengan stakeholder lainnya dalam menyusun masukan untuk Revisi UU Konservasi (UU No. 5/1990) kepada DPR RI.</p> <p>Pada 18 September 2017 FKKM/YKMI bersama dengan Pokja Konservasi dan FOReTIKA telah mengadakan pertemuan dengan DPR untuk menyampaikan masukan kepada RUU 5/1990. Pada kesempatan itu Ada 5 aspek penting yang diusulkan untuk diakomodasi dalam RUU, yaitu: 1) Akses dan pembagian manfaat dari pemanfaatan sumber daya genetik dan pengetahuan tradisional. 2) Perizinan, pengawasan, dan sanksi administrasi. 3) Implementasi kelembagaan konservasi keanekaragaman hayati. 4) Perlindungan hak dan akses masyarakat adat dan lokal. 5) Aspek penegakan hukum dari kejahatan konservasi keanekaragaman hayati.</p> <p>Setelah rilis draf RUU per tanggal 5 Desember 2017, FKKM berkoordinasi dengan para pihak telah mengeluarkan position paper yang ditujukan salah satunya untuk pembuat kebijakan (DPR).</p> <p>verifikasi aktivitas ini telah diupload pada progress report date: Juli - Desember 2017</p>
1	Consolidate stakeholder input for revision of Conservation of Natural Resources and Ecosystems Law (UU No 5 / 1990)	1.2	Meeting agenda; participant lists by name, organizational affiliation, and gender; and summary notes from meeting with conservation experts, practitioners, and Wallacea stakeholders (1 meeting)	<p>Pertemuan dengan praktisi konservasi dan pemangku kepentingan Wallacea dilakukan pada 23-25 September 2017 di desa yang berdekatan dengan kawasan TN Gunung Halimun-Salak. Diskusi tersebut termasuk dalam serangkaian acara bertema: "Kemah Konservasi dan Kehutanan Masyarakat". Pada kesempatan ini, 7 mitra CEPF dari Unanda, Balang Institute, Payo-payo, Perkumpulan Wallacea, Tananua Flores, YPPS Larantuka, dan Kakatua Indonesia berbagi pengalaman mereka dengan praktisi konservasi lainnya, antara lain dari LH TangSel, Komunitas Trashbag, IPB, UNJ, dan UIN.</p> <p>Acara kamp konservasi ini ditutup dengan dialog kebijakan antara Mitra CEPF, praktisi konservasi, dan kelompok tani dengan pembuat kebijakan di Pusat (DPR dan KLHK) serta Pemerintah Daerah. Selain mitra CEPF, dialog juga dihadiri oleh 95 pria dan 44 wanita yang sebagian besar adalah kelompok petani di sekitar taman nasional.</p>

				<p>FKKM bersama Burung Indonesia juga mengadakan Workshop Pelestarian Kehati Laut. Dalam mendukung upaya konservasi keanekaragaman hayati laut, poin penting yang menjadi perhatian, yaitu: Aksesibilitas data dan informasi; Pemberdayaan & kesadaran masyarakat; Meningkatkan kapasitas masyarakat; Integrasi inisiatif konservasi; Kolaborasi dan jaringan; dan Persiapan rencana aksi lokal</p> <p>Verifikasi: Juli-Desember 2017</p>
1	Consolidate stakeholder input for revision of Conservation of Natural Resources and Ecosystems Law (UU No 5 / 1990)	1.3	Participant list by name, organizational affiliation, and gender that leads to drafting of position paper (Deliverable 1.4) (2 meetings)	<p>Meeting dilaksanakan 2 kali pada 17 Juli dan 7 Agustus 2018, dengan lead dari biodiversity specialist, Darmawan dan di support Fathi Hanif. Pertemuan pertama dihadiri 6 orang (5 laki-laki dan 1 perempuan) dari internal FKKM untuk membahas finalisasi konsep paper. Paper ini bukan merupakan paper dengan konsep yang berdiri sendiri, namun merupakan sintesa konsep dari paper-paper yang telah dirilis FKKM bersama Pokja Konservasi dan akademisi terkait dengan revisi UU 5/1990, dengan penekanan di beberapa point.</p> <p>Meeting selanjutnya dilaksanakan pada 7 Agustus yang dihadiri 8 laki-laki dan 3 perempuan dari anggota Pokja Konservasi dan CSO yang lain yang memiliki concern di bidang konservasi dan pemberdayaan masyarakat (Pili, Latin, Huma, dan RMI). Meeting dilaksanakan demi memperoleh input langsung dari stakeholder untuk finalisasi paper.</p> <p>Selain pertemuan/meeting langsung, draft paper juga disirkulasikan kepada stakeholder lain untuk memperoleh input dan lebih memperkaya materi yang disajikan.</p>
1	Consolidate stakeholder input for revision of Conservation of Natural Resources and Ecosystems Law (UU No 5 / 1990)	1.4	Position paper with recommendations on revision to UU5/1990	<p>Position paper telah di rilis dengan title: "Peluang Pengelolaan Kawasan Konservasi oleh Masyarakat dan Perlindungan Jenis Hidupan Liar di tengah Dinamika Perubahan Regulasi"</p>
2	Consolidate stakeholder input for revision of government regulations/policies on social forestry	2.1	Meeting agendas; participant lists by name, organizational affiliation, and gender; and	<p>FKKM/YKMI memiliki concern pada mendorong pembuatan maupun mengkritisi kebijakan yang ada terkait pemberdayaan masyarakat. Dengan fokus pada Perhutanan Sosial dan pemberdayaan masyarakat di kawasan konservasi.</p> <p>Terkait dengan Perhutanan Sosial YKMI/FKKM juga mendorong dan support Dirjen PSKL untuk menyusun</p>

			summary notes from meetings related to Social Forestry acceleration and PerDirjen PSKL/KSDAE (5 meetings)	<p>panduan Monitoring dan Evaluasi (Monev) PS. Meeting yang telah terlaksana yaitu:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 29 Mei 2017, di KLHK Jakarta (7 L, 1 P): PSKL, Kemitraan, FKMM. Meeting tim kecil penyusun panduan monev PS - 12 Juni 2017, di KLHK Jakarta (5 L, 1 P). Meeting tim kecil penyusun panduan monev PS - 16 Agustus 2017, di KLHK Jakarta (15 orang) - 13 Oktober 2017, (15 L, 5 P). peserta: PSKL, Kemitraan, FKMM, KPSHK. Diskusi draft-2 panduan monev PS dan rencana uji coba panduan monev PS - 31 Oktober, Santika Jakarta (10 L, 4 P): Dirjen KSDAE, FKMM, Taman Nasional - 28 Juni 2018, Jakarta (21 L, 2 P): PSKL, tim Monev, Kemitraan, LIPI, Balang Inst. Hasil pertemuan ini dapat membantu PSKL untuk menyelesaikan Panduan Monev PS - 25-26 Juli 2018, Jakarta (21 L, 3 P): FKMM, KSDAE, TN Kelimutu, TN Babul, TNGHS, Latin, SETARA, TLKM, Akar Foundation, BKSDA Bengkulu. Memberikan catatan kritis pada Perdirjen Kemitraan Konservasi dan berkomitmen mendorong implementasi kemitraan konservasi di tingkat tapak
2	Consolidate stakeholder input for revision of government regulations/policies on social forestry	2.2	Meeting agendas; participant lists by name, organizational affiliation, and gender; and summary notes from meetings with civil society (1 meeting)	<p>FKKM/YKMI dalam mendorong pembuatan maupun mengkritisi kebijakan yang ada terkait pemberdayaan masyarakat, selalu melibatkan stakeholder terkait khususnya CSO. Demi memperoleh input pada proses pembuatan panduan Monitoring dan Evaluasi Perhutanan Sosial (Monev PS), FKMM mengadakan meeting dengan Kemitraan dan Samanta yang juga mengundang Ditjen PSKL. Diskusi ini diadakan pada 12 Mei 2017 di Jakarta yang dihadiri 16 pria dan 5 wanita, dengan tujuan memperoleh input awal untuk panduan Monev PS. Dalam rangka mengawal pembentukan kebijakan Kemitraan Konservasi, pada 10-11 Januari 2018 FKMM bekerjasama dengan Burung Indonesia dan Ditjen KSDAE mengadakan event Rapat Koordinasi Kemitraan Konservasi di Labuan Bajo, NTT. Pada kesempatan ini Ditjen KSDAE memberikan penjelasan tentang substansi draft dan progress nya kepada mitra CEPF dan kemudian mereka memberikan masukan langsung pada draft tersebut. Event dihadiri mitra CEPF dan Manajemen Taman Nasional di areal kerja mitra CEPF dengan total 45 pria dan 8 wanita pada 10 Januari, dan 40 pria dan 7 wanita pada 11 Januari.</p> <p>verifikasi telah diupload pada report date: Juli-Desember 2017; dan Januari-Juni 2018</p>

2	Consolidate stakeholder input for revision of government regulations/policies on social forestry	2.3	Participant list by name, organizational affiliation, and gender that leads to drafting of recommendations (Deliverable 2.4) (1 meeting)	<p>Pada 22 Mei 2018, pertemuan membahas konsep final dari position paper ini dihadiri oleh internal FKKM dan Burung Indonesia dengan total 7 laki-laki dan 1 perempuan. Pertemuan membahas titik kritis kertas posisi dan bagaimana melibatkan KLHK dalam prosesnya. Poin-poin penting dalam makalah ini meliputi: Konsep, izin hukum, dan tindakan yang perlu dieksplorasi lebih lanjut. Paper ini di lead oleh Social Forestry Policy Specialist Gladi Hardiyanto.</p> <p>verifikasi telah diupload pada report date: Januari-Juni 2018</p> <p>Position paper disepakati untuk dibuat sesingkat mungkin untuk lebih memudahkan pembuat kebijakan menangkap critical point dalam paper tersebut. Selain itu, input yang selama ini diberikan oleh para stakeholder, khususnya CSO juga telah diakomodir di dalam Panduan Monev PS itu sendiri</p>
2	Consolidate stakeholder input for revision of government regulations/policies on social forestry	2.4	Position paper with recommendations on revisions to regulations for formal community partnerships in the management of conservation areas.	<p>Position Paper telah dirilis dengan tema "Evaluasi Perhutanan Sosial"</p> <p>file deliverable position paper telah di kirim via email ke RIT</p>
3	Support to civil society partners in Wallacea	3.1	Summary trip report listing dates, places, people, gender, and organizations visited, summarizing technical/legal advice provided, and noting basic follow-up actions or recommendations	<p>Asistensi yang telah dilakukan FKKM yaitu:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 29-30 Agustus 2017. Asistensi kepada AMAN Maluku Utara, Kelompok Tani Moya & Tubo. Diikuti 7 orang dari 5 Aman & Kelompok Tani. Asistensi terkait strategi penerapan Perhutanan Sosial wilayah kerja CEPF di MalUt. - 16-18 November 2017. Kab. Sikka-NTT. Wahana Tani Mandiri & Ayu Tani. Asistensi dihadiri 33 pria & 16 wanita dari Burung Indonesia, CEPF partner dan Kelompok Tani. - 6-8 September 2017. Mengundang Aman dan Balang Institute menghadiri event Festival Perhutanan Sosial KLHK. AMAN menyerahkan usulan Hutan Adat kepada KLHK.

			ons (4 TRIPS)	<ul style="list-style-type: none"> - 12-14 Januari 2018. Tananua Flores. Asistensi terkait kebijakan kemitraan konservasi dengan TN Kelimutu. Meeting 12 januari dihadiri 9 pria & 3 wanita; 14 januari: 25 pria & 1 wanita - 15-20 April 2018. Asistensi terhadap Payo-Payo, Balang Institute dan kelompok tani binaan masing-masing. Total melibatkan 18 pria & 4 wanita. Tentang Kebijakan Kemitraan Konservasi dan Pengembangan ekonomi. - 28 April – 1 May 2018. Asistensi kepada Perkumpulan Wallacea di SulSel, sekaligus menghadiri event festival perlindungan ekosistem kompleks Danau Malili. FKKM menjadi salah satu narasumber dalam sarasehan perlindungan ekosistem danau tersebut. Juga memberikan asistensi terkait potensi pemanfaatan HHBK.
3	Support to civil society partners in Wallacea	3.2	Meeting agendas; participant lists by name, organizational affiliation, and gender; and summary notes from meetings with civil society to update PIAPS map with input on locations of various community forestry use licenses (HPhD, HKm, and HTR) (1 meeting)	<p>Pertemuan update PIAPS direncanakan diselenggarakan satu kali di Maluku atau Nusa Tenggara Timur, tetapi FKKM / YKMI bekerja sama dengan BPSKL dan Dinas Kehutanan setempat telah berhasil mengadakan 2 pertemuan untuk mendorong Percepatan Perhutanan Sosial (PS) ini. Pertemuan pertama diadakan pada 28 Agustus di Ternate, Maluku Utara yang dihadiri oleh 38 pria dan 5 wanita dari berbagai institusi seperti BPSKL Maluku-Papua, Dinas Kehutanan Provinsi Maluku Utara, BPDAS Ake Malamo, beberapa Bappeda dan KPH, AMAN, Nuku dan Fakultas Kehutanan Unkhair, serta beberapa perwakilan masyarakat adat. Pertemuan ini membahas strategi pencapaian izin PS serta dukungan dan komitmen para pihak untuk percepatan PS di Maluku Utara.</p> <p>Pertemuan berikutnya diadakan di Kupang, NTT pada 14-15 November. Acara ini dihadiri oleh 60 pria dan 12 wanita dari Dinas Kehutanan NTT, PSKL dan BPSKL JBNT KLHK, dan KPH di NTT. Pada kesempatan ini, Yayasan Ayu Tani Mandiri, Mitra Tani Mandiri, Wahana Tani Mandiri, dan Burung Indonesia berbagi praktik mereka dalam praktik pemberdayaan masyarakat di wilayah kerja mereka. Pertemuan tersebut juga merumuskan rencana kerja PS di setiap kabupaten dan menghasilkan road map untuk percepatan Perhutanan Sosial di NTT.</p> <p>verifikasi telah diupload pada report date: Juli-Desember 2017</p>
4	Policy monitoring and knowledge management	4.1	E-mail copies of the regular updates sent to stakeholders	<p>FKKM bersama mitra khususnya Pokja Konservasi, terus melakukan proses monitoring dan diskusi terkait mendorong revisi UU 5/1990.</p> <p>Setelah DPR merilis Draf RUU No 5/1990 per 5 Desember 2017, kemudian pemerintah mengadakan Rapat Kabinet</p>

			on how to provide input to the process	Terbatas (Ratas) mengenai Revisi UU 5/1990. Namun, pertemuan yang diadakan pada tanggal 4 April 2018 itu menghasilkan pandangan pemerintah bahwa revisi undang-undang no. 5/1990 akan dihentikan sementara. menindaklanjuti kondisi ini, FKKM bersama dengan Kelompok Kerja Konservasi dan CSO lainnya terus melakukan kampanye dan berkomunikasi dengan DPR untuk mendorong proses revisi agar tetap dilanjutkan. Pada 10 April 2018, FKKM bersama dengan kelompok kerja konservasi mengadakan pertemuan audiensi kepada fraksi PKS di DPR yang mendapat tanggapan positif. Anggota Komisi IV dari faksi PKS mengatakan mereka sangat mendukung untuk proses revisi tetap berlangsung.
4	Policy monitoring and knowledge management	4.2	Five policy briefs	Kelima tema Policy Brief / Paper yang telah diterbitkan yaitu: 1. Pendekatan Baru dalam Pengelolaan Daerah Penyangga di KSA & KPA di Indonesia 2. Tantangan Kebijakan Kemitraan Konservasi 3. Peran Serta dan Partisipasi Masyarakat dalam Kawasan Konservasi 4. Percepatan Implementasi Program Perhutanan Sosial 5. Pengembangan Usaha Kelompok Masyarakat Pasca Ijin Perhutanan Sosial file deliverable policy paper telah di kirim via email ke RIT
5	Strengthening of the capacity of YKMI	5.1	Completion of baseline and final CEPF civil society tracking tool	YKMI / FKKM CSTT Baseline scoring result: for Human Resources part showing score 8; Financial Resources shows a score of 10; Management System shows score 14.5; Strategic planning shows score 16; The achievement shows a score of 13. The total score of this CSTT is 61.5.
5	Strengthening of the capacity of YKMI	5.2	Completion of CEPF gender tracking tool	YKMI / FKKM GTT scoring result is 1 point
2	Consolidate stakeholder input for revision of government regulations/policies on social forestry	2.5	Meeting agendas; participant lists by name, organizational affiliation, and gender; and summary notes from meeting with multi stakeholders	Event ini merupakan rangkaian agenda yang dilaksanakan FKKM untuk menyampaikan rekomendasi kebijakan yang telah disusun FKKM bersama mitra kepada policy maker. Selain itu, dengan event ini juga memfasilitasi publik untuk berdiskusi langsung dengan pihak pemerintah tentang konservasi dan kehutanan masyarakat. Event ini dilaksanakan dalam 2 hari (24&25 September 2018), kemudian dilanjutkan dengan diskusi pengembangan ekonomi Perhutanan Sosial bekerjasama dengan Balai PSKL Jawa-Bali-Nusa Tenggara pada 26 September yang juga mengundang mitra CEPF untuk berdiskusi tentang pengembangan Ekonomi khususnya pada komoditas kopi

			that leads to share and publish FKKM's recommendations related to Social Forestry, Conservation, and Community welfare	di wilayah dampungannya. Seminar dengan tema "Kehutanan Masyarakat Menuju Hutan Sosial & Konservasi Sumber Daya Alam" ini dihadiri 27 orang (25 pria & 2 Wanita) pada 24 September, dan 99 orang (57 Pria & 42 Wanita) pada 25 September. Peserta berasal dari berbagai elemen baik Pemerintah, LSM, Swasta, Mahasiswa/Akademisi, Beberapa catatan penting tentang upaya untuk mengembangkan kehutanan masyarakat yaitu, selain perlu fokus pada advokasi makro strategis, juga penting untuk berperan serta dalam peningkatan ekonomi masyarakat. Dirjen KSDAE dalam event ini juga menekankan agar bisa banyak melakukan pendampingan-pendampingan yang lebih manusiawi di kawasan konservasi
5	Strengthening of the capacity of YKMI	5.1	Completion of baseline and final CEPF civil society tracking tool	YKMI / FKKM CSTT Final scoring result: for Human Resources part showing score 9; Financial Resources shows a score of 11; Management System shows score 16; Strategic planning shows score 18; The achievement shows a score of 14. The total score of this CSTT is 68.
5	Strengthening of the capacity of YKMI	5.2	Completion of CEPF gender tracking tool	YKMI / FKKM GTT scoring result is 5 point

Please describe and submit any tools, products, or methodologies that resulted from this project or contributed to the results.

Tidak ada tools khusus yang digunakan dalam proyek. Beberapa metodologi yang digunakan pada proyek adalah pendekatan dialog, diskusi dan 'media approach' terhadap multipihak. Mengingat dalam proses memberikan rekomendasi kebijakan maupun mengkritisi kebijakan yang telah ada, pendekatan tersebut merupakan metode yang tepat untuk dilaksanakan, untuk memperoleh hasil yang representatif.

Produk Kertas Kebijakan: 2 Position Paper dan 5 Policy Paper

Lessons Learned

Describe any lessons learned during the design and implementation of the project, as well as any related to organizational development and capacity building.

Consider lessons that would inform:

- Project Design Process (*aspects of the project design that contributed to its success/shortcomings*)

- Project Implementation (*aspects of the project execution that contributed to its success/shortcomings*)
- Describe any other lessons learned relevant to the conservation community

Dalam mengawal proses revisi undang-undang dan mendorong terbentuknya kebijakan baru, diperlukan komitmen yang kuat dan peran serta dari para pihak. YKMI/FKKM beserta mitra yang terlibat dalam proses ini, memahami pentingnya komunikasi yang intens dengan para policy maker. Pendekatan multi pihak juga sangat penting dilakukan demi meningkatkan bargaining position dalam memberikan input terhadap kebijakan. Khususnya input dari pihak-pihak yang selama ini memperoleh dampak langsung di tingkat tapak. Selama implementasi proyek ini, FKKM dan mitra-mitra CEPF di lapangan juga membangun relasi dan semakin memperluas jaringan untuk dapat saling belajar 'best practice' dari upaya konservasi dan pemberdayaan masyarakat di masing-masing lokasi program.

Sustainability / Replication

Summarize the success or challenges in ensuring the project will be sustained or replicated, including any unplanned activities that are likely to result in increased sustainability or replicability.

Dengan dukungan CEPF, FKKM telah membangun jaringan yang lebih luas terhadap para pihak yang concern di bidang konservasi. walaupun dengan challenge proses revisi UU 5/90 yang masih terkesan "jalan di tempat", para pihak tersebut terus bersinergi untuk mendorong proses revisi ini sehingga menghasilkan Undang-undang yang lebih baik dalam proteksi SDA dan memberikan akses untuk pemanfaatan lestari oleh masyarakat lokal.

Safeguards

If not listed as a separate Project Component and described above, summarize the implementation of any required action related to social, environmental, or pest management safeguards

There is no significant social or environmental safeguards issue emerged during the project period

Additional Comments/Recommendations

Use this space to provide any further comments or recommendations in relation to your project or CEPF

FKKM secara berkala melakukan update informasi terkait Konservasi (khususnya Revisi UU 5/1990) dan kehutanan masyarakat di website FKKM: fkkm.org, serta publikasi paper yang dirilis khususnya dengan dukungan CEPF via link: <http://fkkm.org/policy-brief-paper-fkkm-cepf/>

Additional Funding

Provide details of any additional funding that supported this project and any funding secured for the project, organization, or the region, as a result of CEPF investment

Total additional funding (US\$)

Type of funding

Please provide a breakdown of additional funding (counterpart funding and in-kind) by source, categorizing each contribution into one of the following categories:

- A Project Co-Financing (other donors or your organization contribute to the direct costs of this project)*
- B Grantee and Partner Leveraging (other donors contribute to your organization or a partner organization as a direct result of successes with this CEPF funded project)*
- C Regional/Portfolio Leveraging (other donors make large investments in a region because of CEPF investment or successes related to this project)*

Information Sharing and CEPF Policy

CEPF is committed to transparent operations and to helping civil society groups share experiences, lessons learned, and results. Final project completion reports are made available on our Web site, www.cepf.net, and publicized in our newsletter and other communications.

1. Please include your full contact details (Name, Organization, Mailing address, Telephone number, E-mail address) below

Andri Santosa; YKMI/FKKM; Jl. Sedap Malam Raya No. 4, RT 01/08, Taman Yasmin Sektor III, Kel. Curug Mekar, Kec. Bogor Barat, Kota Bogor; 08129451659 / 0251-7592106; andrisantosa74@gmail.com / seknas-fkkm@indo.net.id.